

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang pesat tanpa peningkatan serta perbaikan SDM yang maksimal menjadi faktor penghambat pembangunan suatu Negara hal ini dapat di imbangi dengan beberapa cara yang di ambil oleh pemerintah salah satunya dengan peran pemerintah dalam menurunkan tingkat fertilitas. Dimana dengan cara ini setidaknya pemerintah mampu mengatur SDM nya sebagai SDM yang mampu bersaing secara global. Melihat laju pertumbuhan penduduk yang tinggi pemerintah terus melakukan pengembangan penduduk yang di mulai dengan tingkat terendah seperti keluarga, Desa/Kelurahan melalui sebuah kebijakan-kebijakan yang di lahirkan oleh pemangku kebijakan di berbagai wilayah Kabupaten atau Kota.

Data ini menunjukkan laju pertumbuhan penduduk dua Kota Batu dan Kota Kediri dimana total masyarakat serta jumlah laju pertumbuhan penduduk menurut wilayah setingkat Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2010, Tahun 2016 dan Tahun 2017 menunjukkan bahwa Kota Kediri dengan penduduk di tahun 2010 berjumlah 296.193 , di tahun 2017 berjumlah 281.978, dan di tahun 2017 berjumlah 284.003 , melihat laju pertumbuhan penduduk di Kota Kediri tahun 2010-2016 mecapai 0,77 dan di tahun 2016-2017 mengalami peningkatan sejumlah 0,72(B. K. Batu, 2018).

Sedangkan Kota Batu jauh lebih membengkak angka laju pertumbuhan penduduk di banding Kota Kediri dengan laju pertumbuhan penduduk di tahun

2010 sejumlah 190.806 , di tahun 2016 berjumlah 202.319 dan di tahun 2017 bertambah 302.997 , laju pertumbuhan penduduk di Kota Batu di tahun 2010-2016 mencapai angka 0,95 dan di tahun 2016-2017 mencapai angka 0,83.

Dari data di atas dapat di bandingkan dengan mengambil sample sebanyak dua data total dari jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Kediri dan Kota batu yang juga berdekatan daerahnya, Kota Kediri memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dari Kota Batu setiap tahunnya bertambah dari data tahun 2017 Kota Kediri memiliki jumlah 284.003 Jiwa dan Kota Batu 203.997 Jiwa selisih 80.006 Jiwa lebih banyak dari Kota Kediri tetapi dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dari Kota Kediri, Kota Batu sendiri mengalami laju pertumbuhan penduduk yang lebih signifikan di tahun 2010 hingga 2017 selisih dengan Kota Kediri 0,18 lebih tinggi laju pertumbuhan penduduk Kota Batu yang juga di pengaruhi oleh beberapa faktor juga antara lain angka kelahiran tinggi, urbanisasi , atau hal lainnya. Kota Batu dengan luas wilayah Kota 202,3 KM dan sebagai Kota wisata perlu adanya persiapan untuk tahun tahun selanjutnya dalam menekan angka fertilitas dan laju pertumbuhan penduduk .

Dengan adanya pemberdayaan SDM di Kota Batu mampu mendukung program pemerintah dan mewujudkan memajukan Kota Batu dengan SDM yang unggul. Oleh sebab itu di mulai dari tingkatan paling bawah seperti Keluarga, RT/RW dan kelurahan atau desa perlu di perhatikan untuk membentuk dan membangun perkampung yang support terhadap Kotanya , dengan ini pemerintah Kota Batu dapat membuat suatu kebijakan yang mendukung fokus pemberdayaan

masyarakatnya atau dengan program dan kebijakan yang di Otonomi Daerahkan oleh pemerintah provinsi ataupun pusat.

Melihat ada masalah di tengah masyarakat yang beragam berupa masalah sosial, ekonomi, dan beberapa sektor lain membuat pemerintah menghadirkan suatu kebijakan publik untuk mengatasi beberapa masalah yang timbul, jika pengimplementasian suatu kebijakan tersebut di jalankan dengan baik dan benar maka mampu mengatasi masalah yang timbul. Dalam hal ini terdapat 4 faktor penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan dimana faktor tersebut berisikan Komunikasi, Sumber daya, Disposisi pelaksana dan yang terakhir struktur birokrasi. Dalam penelitian ini memfokuskan pada faktor pertama yaitu Komunikasi didalam komunikasi juga memiliki 2 indikator yang pertama adalah sosialisasi tujuan kebijakan dan yang kedua adalah manfaat kebijakan (Hasibuan, Yusnadi, & Purba, 2016).

Komunikasi Kebijakan memiliki dua dimensi penting di dalamnya terdiri dari pertama, adalah sosialisasi tujuan kebijakan dimana selaku Dinas DP3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) yang berwenang melaksanakan sosialisasi Advokasi dan Komunikasi Informasi atau biasa di sebut KIE dalam program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga atau KKBPK di lingkup seluruh wilayah Kota Batu . Dalam sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Kepala BKKBN Prov.Jatim dan di hadiri oleh berbagai elemen penting yang juga mendukung terlaksananya program Kampung KB dalam acara sosialisasi ini Dinas menggandeng IDI (Ikatan Dokter Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia) , Dinas Kesehatan, Diskomundag, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas

Pendidikan, Kemenag, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum , bahkan LSM turut di undang dalam sosialisasi ini (Dhani, n.d.).

BKKBN memiliki tujuan dalam kampung KB ini dengan program membuat penduduk yang sehat, bahagia dan sejahtera, dengan ini pemerintah yang berwenang membentuk Kelompok Kerja Program Kampung KB yang secara tugas yang berkewajiban melaksanakan dan melayani penduduk yang mengikuti Kampung KB dimana hal ini pada bidang Kependudukan, Keluarga Berencana serta Pembangunan Keluarga, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial Ekonomi, Bidang Sosial Kemasyarakatan, Bidang Pendidikan, Bidang Agama, Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana Pokja yang bertugas mendukung dan di lindungi oleh Wali Kota Batu dengan Pembina Sekda dan Ketua Pokja di Tingkat Kota ialah Kepala Dinas DP3AP2KB dengan sekretaris kepala Bapelitbangda.

Dimensi komunikasi yang kedua, adalah manfaat dan tujuan , dimana dalam sebuah kebijakan jelas mempunyai suatu manfaat yang di rasakan oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk manfaat dari kebijakan ini memiliki kesamaan antar Kampung KB Kota/Kabupaten yang lain mengingat Kampung KB adalah suatu kebijakan atau program yang di Otonomi Daerahkan. Dimana manfaat dari Kampung KB adalah mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Intinya program ini melibatkan semua sektor pembangunan. Dengan kata lain, Kampung KB tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan. Selain itu Kampung KB juga memiliki manfaat lain dimana antaranya membangun masyarakat berbasis keluarga,

menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran berbagai pihak seperti swasta, provider, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh pemerintah kota batu melalui kebijakan publik program Kampung KB yang dimana dilaksanakan oleh beberapa unsur penting yang berperan dalam melaksanakan program Kampung KB agar mencapai tujuan bersama dan mendapatkan keberhasilan yang Nampak dan dapat dirasakan masyarakat yang menjadi sasaran pemerintah, tentu dalam pelaksanaan dan penerapannya perlu adanya komunikasi yang terjalin antara elemen untuk mendukung adanya Kampung KB.

Jika kita mendengar istilah “Kampung”, kesan yang muncul di pikiran kita pasti akan tertuju pada suatu tempat hunian dari sekumpulan orang atau keluarga dengan segala keterbelakangan, keterbatasan, tertinggal, kolot, kumuh, terpencil, dan beberapa sebutan lainnya yang terkait dengan kampung. Dalam hal ini maka pemerintah membuat suatu program Kampung KB untuk menyejahterakan masyarakat. Sejak Kampung KB dicetuskan dan disetujui oleh presiden RI (Ir.Joko Widodo) pada bulan Januari 2016 pemerintah terus menggenjot program ini yang ditugaskan kepada BKKBN seluruh Indonesia yang kemudian untuk dilakukan oleh tiap Kabupaten dan Kota (BKKBN, 2019).

Kampung KB adalah singkatan dari Kampung Keluarga Berencana yang bertujuan mewujudkan suatu keluarga yang sehat dan sejahtera dengan point tujuan dengan menekan angka kelahiran, dalam hal ini idealnya setiap keluarga

memiliki dua (2) keturunan saja. Dalam program Kampung KB ini di harapkan mampu berjalan secara terpadu dan berkesinambungan dengan beberapa program lainnya seperti program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dan Program-program pembangunan lainnya(Zuraidah, 2017).

Tujuan dari adanya Program Kampung KB yaitu bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa/kelurahan dalam strata Keluarga melalui program KKBPK yang juga bertujuan membangun sektor terkait lainnya untuk mewujudkan Keluarga Kecil yang berkualitas di berbagai sektor. Jika di lihat lebih dalam khususnya Kampung KB juga di bentuk untuk meningkatkan peran serta pemerintah , Lembaga non Pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi untuk mendampingi dan membimbing masyarakat agar mampu menjalankan program KKBPK dan sektor terkait, serta bertujuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat tentang pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Program Kampung KB ini di dukung beberapa instrument hukum dimana dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 yang berisi tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menjadi dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana yang menekan kewenangan kepada BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) untuk tidak terus memfokuskan program pada masalah pengendalian penduduk saja tetapi masalah yang penting di mulai dari pemangunan tingkat paling bawah yaitu keluarga yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan lebih(Kemenpa, 2019). Maka dari itu di dalam penguatan program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) di tahun 2015-2019, dalam hal

ini BKKBN di harapkan mampu menyusun suatu kegiatan yang mampu bertujuan memperkuat dalam upaya pencapaian suatu target serta sasaran yang di inginkan dengan langsung bersentuhan dan memberikan beberapa manfaat yang di rasakan oleh masyarakat.

Dengan mengacu pada Surat Kepala BBKN yang di terbitkan Nomor : 1258/AK.001/G.1/2015 perihal Intruksi Untuk Mengaungkan Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga), yang bertujuan dan berisikan memperkuat branding program KKBPK di semua lini khususnya wilayah kumuh , kemiskinan , dan padat penduduk melalui peningkatan kerjasama dengan stasiun radio pemerintah/ swasta , Menggiatkan kembali gerak MUKPEN (Mobil Unit KB), setiap anggota yang terdaftar pada BKKBN yang bertugas menjadi petugas KB dan komunikator Program KKBPK serta mempersiapkan sasaran khusus melalui Kampung KB di Kabupaten/Kota Minimal satu kampung KB(M.Yani, 2018).

Di tunjang dan di dukung oleh Perwali Kota Batu Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi , serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana Kota Batu mampu mendukung RPJMD Kota Batu tahun 2018-2022 yang memiliki sasaran meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM , indeks pemberdayaan gender (IDG), menurunkan kesenjangan ekonomi antar wilayah dan status desa sebagai desa mandiri.

Dalam Peraturan Presiden Nomor.79 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 Kebijakan Program Kampung KB dalam Mendukung

KKBPK adalah meningkatkan suatu pelayanan pada keluarga berencana serta kesehatan reproduksi. Sama halnya dengan suatu rancangan suatu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang tertuang di dalam Permen PPN/Bappenas No. 2/2019 tentang Rancangan RKP Pemerintah Tahun 2020, tema rancangan RKP 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Tema ini menitik beratkan pada isu pembangunan kualitas manusia yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan program dari RKP tahun sebelumnya. Dalam RKP 2020 telah diformulasikan 3 kebijakan program KKBPK, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, menguatkan tata kelola Program KKBPK, meningkatkan akses terhadap layanan dan data kependudukan, dengan strategi pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta pendataan keluarga (kemenkopmk, 2019).

Untuk kebijakan Kampung KB sendiri merupakan Otonomi Daerah yang mengacu pada BKKBN Nasional dan BKKBN Provinsi dimana sesuai dengan yang di perintahkan Pemerintah suatu daerah untuk tetap memberikan anggaran untuk balai penyuluhan KB yang telah di berikan selama ini, dimana BOKB tidak termasuk dana utama di dalam penyelenggaraan upaya dalam Program KKBPK di Balai Penyuluhan KB. Yang terkandung pada Rencana Kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu pada Tahun Anggaran 2017/2019 di Point 1, Meningkatnya pengendalian penduduk dengan sasaran menekan laju pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana Dalam Program Kampung KB dengan sasaran masyarakat / penduduk.

Dari 19 desa Kota Batu baru tujuh desa yang menjalankan dan di tunjuk sebagai kampung KB. Yakni desa Pesanggrahan, Oror-oro Ombo, Giripurno, Sumber brantas, Torongrejo, Tlekung, dan Desa Beji (surya malang, 2018). Kampung KB sendiri yang menjadi contoh untuk Kota Batu adalah Desa Giripurno Dusun Sawahan, Di pilihnya Desa Giripurno Sebagai Kampung KB Percontohan karena penyumbang pernikahan dini yang paling tinggi di Kota Batu Adalah Kecamatan Bumiaji di lihat dari data yang menunjukkan jumlah pernikahan dini di Kecamatan Bumiaji 484 jiwa, dari data Tahun 2017 perkawinan di bawah usia 20 Tahun Kecamatan Bumiaji berjumlah 211, untuk Kecamatan Junrejo 154 dan Kecamatan Batu berjumlah 87 . untuk peserta KB aktif Kecamatan Bumiaji memiliki presentase paling rendah di banding Kecamatan Batu dan Junrejo yang mecapai 0.76-0.77 dimana Kecamatan Bumiaji hanya mecapai Presentase hanya mecapai 0.75 , Kecamatan Bumiaji Khusus nya Desa Giripurno yang sebagai Kampung KB percontohan di anggap Dinas DP3AP2KB Kota batu Bahwa partisipasi Masyarakat Desa akan KB masih rendah dan Tingginya angka pernikahan dini, tingkat penggunaan alat KB , Stunting ,SDM Rendah yang menjadi Alasan di Bentuk nya KKBPK di beberapa Desa, indikator yang berada di Desa Giripurnopun memenuhi syarat dimana Tersedianya Data kependudukan yang akurat, dukungan dari Stakeholder dan Pasrtisipasi masyarakat yang tinggi akan di bentuknya KKBPK.

Dalam melaksanakan Kampung KB tentu pemerintah memiliki sistem pengelolaan dari kebijakan yang di buat. Menurut Harsoyo (1977:121) yang memberikan pengertian dalam pemaparan nya bahwa pengelolaan merupakan sebuah istilah yang bermula dari kata “kelola” di sini perlu di tegaskan bahwa

kelola merupakan serangkaian usaha yang bertujuan dalam menggali dan memanfaatkan berbagai potensi yang di miliki dengan efektif dan efisien agar mencapai suatu tujuan yang di inginkan dan terencana sebelumnya(Stutiari & Arka, 2019). Pengelola Kampung Keluarga Berencana (KB) bertugas meningkatkan kualitas hidup manusia dan memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Untuk menjalankan tugas penting terkait Nawacita Program KKBPK. Perubahan sistem pengelolaan program KB yang semula sentralisasi menjadi system otonomi daerah , maka secara otomatis program kependudukan keluarga (KKBPK) menjadi tanggung jawab daerah , sedangkan tingkat pemerintah pusat lebih bersifat penentuan standarisasi, memberikan fasilitas , dan koordinasi antar wilayah.

Dalam manajemen perencanaan dan pengelolaan dengan (Planing, Organizing, Actuating, Controlling) POAC , dalam hal ini manajemen dapat di artikan sebagai salah satu proses dalam mengatur dan menggunakan suatu sumberdaya yang di miliki organsiasi dengan kerjasama para anggotanya untuk menggapai sebuah sasaran organisasi yang di inginkan secara efektif serta efisien. Hasibuan (2011) memeberikan penjelasan dimana manajemen ialah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemberdayaan SDM secara efektif dan efisien dalam menggapai sasaran tertentu. Dari aktivitas manajemen mengandung beberapa aspek yang luas dengan proses awal asampai akhir dimana di dalam proses pertamanya diawali oleh Planning selanjutnya dengan Organizing yang ketiga Actuating dan yang terakhir Controlling dalam mencapai tujuan yang di inginkan agar efektif dan efisien. Suatu manajemen yang baik bisa di katakana baik jika mampu mencapai tujuan dengan melakukan proses secara disiplin guna usaha

yang dilakukan mampu berjalan dengan lancar dengan apa yang ingin di capai sesuai sasaran yang di targetkan.

Dalam pengelolaan kampung KB dalam mendukung program KKBPK perlu suatu pengelolaan se sesuai dengan (Planing, Organizing, Actuating, Controlling) POAC. dimana Planing adalah suatu perencanaan yang bertujuan menyusun beberapa langkah-langkah yang di ambil secara sistematis dan teratur yang di gunakan untuk mencapai tujuan suatu organisasi bahkan memecahkan jika ada timbulnya masalah . Perencanaan juga sebuah upaya dalam medayagunakan sumber-sumber yang ada serta memperhatikan suatu keterbatasan untuk menggapai tujuan yang efektif dan efisien.

Selanjutnya Organizing atau bisa di sebut dengan Pengorganisasian yaitu sebuah kegiatan yang berisikan pembagina tugas-tugas kepada setiap individu atau kelompok yang termasuk di dalam aktivitas suatu organisasi dan melihat sumber daya manusia yang di miliki. Dalam hal ini dapat di artikan bahwa kegiatan pengorganisasian adalah proses keseluruhan untuk menunjuk orang-orang dan mengalokasikan suatu sarana dan prasarana. Beda dengan proses selanjutnya yaitu Actuating yang memiliki arti Perencanaan dan Pengorganisasian dalam hal ini mencakup dua unsur penting di dalamnya dimana di proses ini kurang berarti bila tidak di sertai dengan pelaksanaan kerja organisasi yang bertanggung jawab. Dalam hal ini unsur penting yang di butuhkan adalah mampu mengoptimalkan Sumber Daya manusia yang ada yang bertujuan mencapai Visi dan Misi serta program kerja organisasi. Perlu di garis bawah i agar pelaksanaan kerja wajib selaras dengan suatu rencana kerja yang di susun sebelumnya. Proses pengelolaan dengan POAC yang terakhir ialah Coontrolling

yang di artikan sebagai tahap akhir karena dalam proses Controlling tidak hanya mengendalikan pelaksanaan program dan aktivitas organisasi, tetapi dalam hal ini bertujuan mengawasi sehingga akan mampu mengadakan suatu koreksi (Faisal, Zanah, & Sulaksana, 2016). Hal yang di lakukan oleh staff mampu di koordinasikan kejalan yang pasti dengan tujuan yang jauh sudah di rencanakan. Jadi kesimpulan dalam proses controlling ialah proses mengawasi agar mampu memastikan bahwa pelaksanaan yang berjalan mampu sesuai dengan rencana.

Maka dapat di kaitkan dengan teori Komunikasi Kebijakan yang di kemukakan oleh Edward III yang di terangkan di dalam widodo (2010 :97), yang menerangkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada pihak komunikan, hal ini perlu di tegaskan dan di berikan kepada pelaku kebijakan supaya para pelaku kebijkana sendiri mampu mengetahui hal apa yang wajib mereka siapkan dan di lakukan untuk melakukan kebijakan tersebut agar mampu mencapai tujuan dan sasaran sebagai mana kebijakan yang di implementasikan untuk di rasakan masyarakat

Di dalam Manajamenen pelaksanaan Kebijakan (Planing, Organizing, Actuating, Controlling) POAC mulai dari proses Planing hingga yang terakhir Controlling perlu adanya sebuah komunikasi dalam setiap proses Kebijakan khususnya pada saat implementasi untuk memberikan informasi mengenai kebijakan Kampung KB agar para pelaku sendiri mengerti tujuan dan sasaran nya guna tercapainya sebuah kebijakan tersebut.

Dimensi yang di butuhkan dalam pengelolaan ini adalah controlling karena pada Kebijakan Kampung KB untuk mendukung Program (Kependudukan

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) KKBPK ini sudah berjalan sejak tahun 2016 maka sekarang saatnya controlling tentang implementasi kebijakan tersebut, agar Kebijakan berjalan sesuai dengan Visi, Misi, Aturan dan Program kerja maka di butuhkan suatu pengontrolan baik dalam bentuk supervise, pengawasan, inspeksi hingga audit. Bagaimana sejak dini dapat di ketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sesuai dengan perumusan dan pengimplementasian kebijakan yang termasuk dalam beberapa proses di dalamnya seperti perencanaan lalu pelaksanaan bahkan pengorganisasian. Maka dalam hal ini mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul kemudian di adakan suatu koreksi ataupun antisipasi serta penyesuaian-penyesuaian dengan melihat kondisi dan situasi yang mengikuti perkembangan zaman di lapangan. Dalam hal ini pengelolaan dari program yang sudah berjalan mampu berjalan dan sesuai harapan dengan adanya proses controlling dari pemerintah dan masyarakat sebagai objek sekaligus pelaku program kampung KB.

Mekanisme operasional pengelolaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga pada tingkat kecamatan merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai unsur baik pengelola dan pelaksana untuk mencapai kesepakatan di dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan operasional dan pengendalian operasional di lapangan, terdapat beberapa pelaksana dan pengelola dimana tingkat kecamatan diisi unsur camat, anggota muspika, pengawas PKB/PLKB, kepala puskesmas, kepala organisasi perangkat daerah bidang KB, tokoh masyarakat, pimpinan LSOM, ketua tim penggerak ketua PKK dan pimpinan organisasi swasta dan pengusaha. Sedangkan di tingkat Desa pelaksana dan pengelola diisi unsur, Kepala desa, anggota pamong desa,

PKB/PLKB, Bidan di Desa, PPKBD, Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama, ketua tim penggerak PKK dan institusi perdesaan lainya(M.Yani, 2018).

Melihat kebijakan publik program Kampung KB ini yang bersifat system otonomi daerah yang memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat khususnya di wilayah tingkat kecamatan/desa maka perlu adanya sebuah komunikasi kebijakan yang tersusun dan terjalin dengan rapi , dimana sebuah program kependudukan Kampung KB ini harus selaras dengan program kota dan desa agar mendapat dukungan dari faktor lain seperti dana anggaran, dengan peneglolaan memanfaatkan potensi dan sumberdaya wilayah dengan menjalin kerjasama antar pemangku kepentingan dan unsur masyarakat di harapkan Kampung KB ini mencapai program yang ingin di capai sesuai dengan tujuan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana komunikasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Program Kampung KB di Desa Giripurno Kota Batu?
2. Apa Yang Menjadi Faktor Penghambat Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Program Kampung KB di Desa Giripurno Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Komunikasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kampung KB di Desa Giripurno Kota Batu.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Kampung KB Di Desa Giripurno Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dalam akademis manfaat yang diinginkan ialah peneliti ingin menambah dan memperkaya pengetahuan yang ada bagi akademisi agar menjadi salah satu sumbangan ilmiah tentunya juga menambah bahan kajian akademik, referensi bagi banyak pihak dan tambahan bagi pembaca lainya tentang informasi yang berkaitan dengan Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Kampung KB
2. Yang kedua manfaat secara praktis ialah agar dalam menjalankan suatu kebijakan pemerintah mampu memberikan saran dan masukan yang sudah di lakukan penelitian terhadap hal untuk memahami dan soslusi persoalan yang timbul , teruntuk hal yang berkaitan dengan Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Kampung KB.

1.5 Definisi Konseptual

1. Komunikasi

Secara istilah beberapa ahli Komunikasi menjabarkan pengertian dan penjelasanya terhadap “komunikasi” melihat dari sudut pandang dan pendapat masing-masing peneliti diantaranya adalah Danil vardiansyah mengemukakan (Vardiansyah, 2008) :

- a. Jenis & Kelly menyebutkan “Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya (khalayak)”.

- b. Berelson & Stainer “Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lainlain”

2.Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu proses kegiatan yang berisikan aktivitas intelektual serta berjenis politis. Dalam hal ini terlihat proses berbagai kegiatan yang terjadi pada aktivitas politis yang juga berisikan tentang penyusunan agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi Kebijakan, Implementasi Kebijakan serta Penilaian kebijakan (Taufikurahman, 2014).

Jika melihat penjabaran menurut Bill Jenkins yang menerangkan Kebijakan Publik yang di muat pada buku *the policy process* menjelaskan bahwa Kebijakan Publik merupakan keputusan yang berlandaskan dari keterkaitan hubungan dan di jalankan oleh aktor politik untuk menetapkan suatu tujuan serta memperoleh hasil menurut inspeksi kondisi tertentu.

Terdapat penjabaran kedua tentang Kebijakan Publik yang di terangkan oleh Said Zainal Abidin yang merupakan alumni akademisi dari University Of Pitsburg, Pennsylvania, US. Dalam hal ini Said Zainal Abidin menerangkan jika Kebijakan Publik memiliki sifat yang lebar serta berada pada jajaran ideal jadi tidak spesifik dan sempit. Karena itu Kebijakan Publik bertujuan untuk menjadi panduan yang bersifat umum untuk kebijakan serta ketentuan-ketentuan privat yang di bawahnya.

3. Pengelolaan

Dalam penjelasan yang di kemukakan oleh Harsoyo (1977:121) menjelaskan jika pengelolaan merupakan dari kata istilah yang pertama “kelola” berratikan dalam mencapai usaha mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada ntah dalam hal apapun yang di miliki untuk di lakukan secara efektif dan efisien demi menggapai tujuan tertentu yang sudah di agendakan jauh-jauh.

Kedua yang di kemukakan George R.Terry (1999) menjelaskan Pengelolaan atau bisa di artikan manajemen merupakan suatu metode tertentu yang akan di jalankan sejak dari suatu perencanaan hingga dengan mengevaluasi hasil(Turyono, 2015).

4. Kampung KB

Kampung KB memiliki definisi merupakan perkumpulan wilayah setara RW(Rukun Warga) , Dusun atau yang sejajar serta memiliki kriteria tertntu. Dalam hal ini terdapat keselarasan dengan Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Brcnaca dan Pembangunan Keluarga) serta Penataan kawasan tertentu yang dijalankan secara terencana dan terorganisasi (Badan kependudukan dan Keluarga Berencana 2017).

- a. Yang menjadi ikon KB untuk media kampanye perluasan serta pengenalan Program KB adalah Kampung.
- b. Melakukan pembinaan berjalanya ber KB yang berpengaruh untuk menurunkan tingkat kelahiran.
- c. Melakukan pendekatan pelayan terhadap masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat .

1.6 Definisi Operasional

1. Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Program Kampung KB Di Desa Giripurno Kota Batu.
 - a. Sosialisasi Kebijakan Program Kampung KB.
 - b. Manfaat Kebijakan Program Kampung KB.
 - c. Pengelolaan Kebijakan Program Kampung KB.
2. Faktor Penghambat Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Program Kampung KB Di Desa Giripurno Kota Batu.
 - a. Anggaran Yang Di Alokasikan Pada Program Kampung KB.
 - b. Belum Terjalinya Hubungan Antar Lintas Sektor dan Masyarakat.

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kualitatif deskriptif, yang berisikan data kata-kata, gambar, bukan kata-kata di dapat dan di kumpulkan. Dalam penyampaian menurut Bodgan dan Tylor yang di muat oleh Lexy J. Moeloeng bahwa penelitian kualitatif merupakan tata cara penelitian yang mendapatkan data deskriptif berbentuk kata-kata tertulis atau lisan yang bersumber dari individu atau pun kelompok serta kegiatan yang di teliti. Sedangkan penelitian deskriptif ialah penelitian untuk menggambarkan dan mendiskripsikan gejala-gejala yang nampak, baik gejala alamiah ataupun buatan manusia (prof.dr.lexy j . moloeng, 2014).

Untuk tujuan penelitian deskriptif ialah untuk penggambaran secara terstruktur, factual dan tepat tentang kenyataan dan sifat persebaran atau wilayah tertentu. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang di laksanakan bertujuan melihat

keadaan faktor mandiri, ntah pada satu faktor bahkan lebih dengan tidak membuat faktor lainnya serta tidak melakukan analogi atau menyatukan satu faktor lainnya (faktor sendiri ialah faktor yang individual bersifat berdiri sendiri beda dengan faktor independen yang karena faktor independen memiliki pasangan faktor dependen).

2.Sumber Data

Dalam penelitian yang di teliti ini peneliti menggolongkan jenis data seperti di lapangan yang merupakan data primer di dapat langsung melewati beberapa proses observasi dan wawancara . data lainnya yang di gunakan peneliti ialah data sekunder yang di dapatkan bebeberapa sumber seperti objek penelitian yang di dapat dari literatur yang sudah ada serta dapat berbentuk buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen maupaun sumber ilmiah yang tersedia(Rianto, Nengsih, & Setyadiharja, 2019).

3.Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder dan data primer yang tersedia di butuhkan dalam peneltian ini. Yang berisikan tindakan infroman dan kata-kata, dokumentasi atau sumber data tertulis serta foto realita di lapangan merupakan termasuk di dalam jenis data sekunder. Sedangkan data primer jauh lebih di butuhkan sebagai kunci untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jadi data sekunder mampu juga mendukung data primer yang di dapat karena mampu menjadi rujukan dan perlu di garis bawahhi jika teknik yang di gunakan teknik sumber multi bukti(Sugiono, 2008).

A.Wawancara

Wawancara menekankan pada teknik pengumpulan data dengan cara tatap muka dan tanya jawab secara langsung yang dilakukan antara peneliti dan narasumber. Dengan berkembangnya jaman maka penelitian wawancara untuk jaman sekarang bisa dilakukan dengan cara telepon, Email bahkan skype atau cara lain melalui media-media. Dalam wawancara terbagi menurut dua kategori dimana yang pertama wawancara terstruktur dan yang kedua wawancara tidak terstruktur.

Yang pertama wawancara terstruktur berarti peneliti mengetahui seluk beluk informan yang akan diwawancarai, jadi peneliti sudah menyiapkan pertanyaan yang sudah terusun sebelum melakukan wawancara. Untuk mempermudah dan menambah pengingatan hasil wawancara peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti halnya recorder, kamera di gunakan untuk foto, maupaun alat bantu lainnya.

Yang kedua ialah wawancara tidak terstruktur yang berartikan wawancara secara bebas. Lebih menekankan pada point-point penting yang terdapat pada masalah yang di korek dari responden, jadi pertanyaan-pertanyaanya spesifik dengan tidak menggunakan pedoman.

B.Observasi

Observasi bisa dikatakan dengan metode pengumpulan data yang kompleks mengapa demikian dikarenakan mengikutsertakan banyak faktor dalam melakukannya. Metode ini di gunakan untuk merekam beragam fenomena yang terjadi. Metode observasi lebih tepat di gunakan dalam penelitian yang mengamati

dan mendalami perilaku manusia, proses kerja dan gejala alam. Jika kita menemui responden yang kuantitasnya minim maka metode ini cocok di pilih. Dalam hal ini metode observasi pun di bagi menjadi dua yang berisikan sumber Participant Observation dan Non Participant Observation dimana yang pertama Participant Observation bahwa peneliti turut andil secara nyata dalam penelitiannya untuk mengamati target penelitian. Sedangkan yang kedua Non Participant observation ialah sebaliknya jadi peneliti tidak ikut turut serta dalam penelitiannya.

C.Dokumentasi

Teknik dokumentasi di dalam penelitian yang di lakukan ini ialah teknik dengan tata cara mengumpulkan dan mengamati dokumen-dokumen yang di butuhkan dalam penelitian , karena dokumen merupakan catatan yang sudah berlalu. Dokumen juga berupa bentuk seperti gambar, Karya-karya ataupun tulisan dari individu. Jadi proses ini bertujuan pelengkap dari kekurangan dan menggabungkan hasil dari obersvasi dan wawancara yang di butuhkan peneliti. Perlunya juga peneliti mencari tambahan pengetahuan berupa referensi dari jurnal, buku, artikel yang tersedia serta sumber dari internet lainnya .

D.Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini saya menggunakan Purposive Sampling dimana Non Random peneliti menentukan pengambilan sampel yang memenuhi ciri-ciri, dimana yang menjadi subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan pada Program Kampung KB yaitu Kepala Dinas DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kota Batu yang berwenang melakukan dan melaksanakan tugas program Kampung KB,

Kepala Desa Giripurno sebagai Pemerintah Desa yang berwenang dalam lokasi Kampung KB dengan Perangkat Desa sejumlah 2 Orang, dan Masyarakat Desa Giripurno Sejumlah 7 Orang yang menjadi perwakilan pelaku Kampung KB sendiri.

E.Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada pada lingkup yang berhubungan dengan judul yaitu Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Kampung KB yang menjadi fokus pengambilan data penelitian, peneliti melaksanakan penelitian di instansi terkait seperti Dinas DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana) Kota Batu yang bertempat di Balaikota Among Tani – Gedung A Lantai 2 Jalan Panglima Sudirman No.507, Dengan Pemerintah Desa Giripurno di Jl. Arjuno No.05 Kecamatan Bumiaji tepatnya di Dusun Sawahan yang menjadi lokasi Kampung KB percontohan di Kota Batu serta menjadi lokasi turun lapang peneliti.

F.Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan referensi yang dikemukakan oleh Taylor yang menjelaskan analisis data ialah proses menentukan suatu hipotesis dalam penelitian yang bertujuan membantu peneliti di dalam penelitian hipotesis di perlukan secara terinci (Taylor, 1975).

Perlunya analisis data yang dilakukan sejak awal sebelum memasuki lapangan, meneliti di lapangan dan setelah usai di lapangan merupakan isi dari penelitian Kualitatif. Sedangkan model interaktif di gunakan dalam menganalisis data karena meninjau bahwa model ini cocok untuk metode penelitian deskriptif.

Penelitian kualitatif juga di lakukan secara terus menerus hingga mendapatkan data yang di inginkan, cara coding di lakukan dalam mengalasis data kualitatif jadi coding ini mampu membantu penenliti dalam menarik kesimpulan dari peneltian yang dilakukan secara jelas , tepat dan terstruktur karena coding juga melibatkan penentu kosen atau kriteria yang mengawali(Taylor, 1975).

a.Reduksi Data

Dalam penelitian ini data yang di dapat dari serangkaian tahap salah satunya tahap observasi wawancara dan dokumentasi masih berupa data abstrak terdapat di lapangan maka tugas peneliti untuk memilih data yang di butuhkan yang sesuai untuk menjawab pertanyaan. Lalu data yang di butuhkan dan sudah di pilih lalu di ringkas, data yang penting dan relevan saja yang di pilih untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian . reduksi data merupakan hal yang di lakukan dalam mengkategorikan serta mengarahkan sedangkan data yang tidak di butuhkan bisa di buang agar mampu membuat kesimpulan dan melakukan verifikasi.

b.Penyajian Data

Pada tahap ini bisa di bilang tahap inti dimana setelah melewati berbagai rangkaian maka hasil penelitian yang berupa data yang sudah valid akan di sajikan dan di tuliskan melauai hasil dari reduksi data yang berupa penjelasan deskripsi. Tentunya data yang di sajikan adalah data yang mampu menjawab permasalahan dalam penelitian yang di teliti. Selanjutnya setelah menyajikan data maka dapat di Tarik kesimpulan dan mampu memberikan suatu tindakan selanjtunya dalam penyusunan skripsi.

